



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI  
TRIWULAN I  
BULAN MARET 2019**

**Disusun Oleh:  
Badan Pelaksana  
Badan Pengelola Keuangan Haji  
(BPKH)**

**Disampaikan kepada  
Dewan Pengawas**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## OUTLINE

Latar Belakang

Tujuan

Kinerja BPKH

Kinerja Bidang Secara Umum

Kegiatan *Expose Media* dan Rapat dengan *Stakeholder*

Manajemen Risiko BPKH *Wide*

Laporan Hukum dan Kepatuhan

Laporan Hasil Audit Internal BPKH

Laporan Keuangan BPKH

Penutup

Lampiran 1 Sebaran Nilai Manfaat BPS-BPIH

Lampiran 2 Rekap Kinerja dan Penyerapan

Lampiran 3 Kegiatan non Anggaran

Lampiran 4 Rencana Bulan April

Lampiran 5 Laporan Manajemen Risiko

Lampiran 6 Laporan Hukum dan Kepatuhan

Lampiran 7 Laporan Keuangan

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI  
TRIWULAN I  
BULAN MARET 2019**

**I. Latar Belakang**

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Triwulan I bulan Maret 2019 merupakan amanah dari Pasal 52 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Pasal 10 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, Badan Pelaksana BPKH diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji yang berisi Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

**II. Tujuan**

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Triwulan I bulan Maret 2019, meliputi antara lain:

- a. memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana;
- b. melakukan analisis dan evaluasi mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana;
- c. sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana dalam pengelolaan keuangan haji.

**III. Kinerja BPKH**

Sepanjang periode Triwulan I tahun 2019, secara umum masing-masing bidang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disusun sebelumnya. Pencapaian output dan penyerapan anggaran periode Januari-Maret 2019 sudah cukup mewakili kinerja BPKH secara institusi (Triwulan I tahun 2019).

Pada Tabel 3.1 di bawah, digambarkan target bisnis BPKH tahun 2019 dengan pencapaian selama Triwulan I 2019.

**Tabel 3.1. Pencapaian Target Bisnis BPKH Triwulan I Tahun 2019**

No.	Deskripsi	Target 2019	Target TW I 2019	Realisasi TW I 2019	%	Deviasi pencapaian (%)
1.	Total Dana Kelolaan	121,3 triliun	114,8 triliun	117,1 triliun	101,99	+1,99
2.	Jumlah Pendaftar Calon Jemaah Haji Baru					
	a. Reguler	680 ribu orang	170 ribu orang	148 ribu orang	89,59	(10,41)

No.	Deskripsi	Target 2019	Target TW I 2019	Realisasi TW I 2019	%	Deviasi pencapaian (%)
	b. Khusus	-	-	3,9 ribu orang	-	-
3.	Tambahan Dana Kelolaan Baru	16,25 triliun	4,06 triliun	3,81 triliun	93,84	(6,16)
	a. Reguler	16,25 triliun	4,06 triliun	3,76 triliun	92,61	(7,39)
	b. Khusus	-	-	55,29 miliar	-	-
4.	Pendapatan	7,22 triliun	1,80 triliun	1,59 triliun	88,33	(11,67)
	a. Penempatan Dana	2,96 triliun	740 miliar	807,51 miliar	109,12	+9,12
	i. Giro dan Tabungan	14,29 miliar	3,57 miliar	7,21 miliar	201,96	+101,96
	ii. Deposito	2,86 triliun	715 miliar	784,82 miliar	109,76	+9,76
	iii. Dana DAU	88,66 miliar	22,16 miliar	15,48 miliar	69,85	(30,15)
	b. Investasi	4,26 triliun	1,06 triliun	791,59 miliar	74,33	(25,67)
	i. Surat Berharga	3,68 triliun	920 miliar	759,40 miliar	82,54	(17,46)
	ii. Emas	-	-	-	-	-
	iii. Investasi Langsung	92,9 miliar	23,22 miliar	-	-	-
	iv. Investasi Lainnya	377,2 miliar	94,3 miliar	-	-	-
	v. Dana DAU	111,66 miliar	27,91 miliar	32,19 miliar	115,33	+15,33
5.	Pengeluaran					
	a. BPIH (indirect cost)	7,04 triliun	-	-	-	
	b. Virtual Account	1,2 triliun	-	-	-	
	c. Kemaslahatan	177,13 miliar	44,28 miliar	3,84 miliar	8,67	(91,33)
	d. Operasional BPKH	282,44 miliar	70,61 miliar	21,69 miliar	30,72	(69,28)

Pada tabel 3.1 di atas, pencapaian target dana kelolaan BPKH pada Triwulan I mencapai 101,99%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target tersebut melampaui target yang telah ditentukan. Selain target dana kelolaan yang pencapaiannya melebihi target, hal serupa juga dialami oleh capaian target nilai manfaat penempatan yaitu sebesar 109,12% dan pencapaian nilai manfaat DAU untuk investasi sebesar 115,33%.

Tabel 3.2 di bawah, merupakan informasi mengenai jumlah penambahan calon jemaah haji baru secara akumulatif pada bulan Maret 2019 yang berjumlah 148.394 orang untuk calon Jemaah haji reguler dan 3.917 orang untuk calon Jemaah haji khusus, dengan pencapaian proporsional 22,83% dari target total 2019 sebanyak 650.000 orang. Namun apabila dibandingkan dengan pencapaian pada target Triwulan I 2019, pencapaiannya sebesar 91,32%. Calon jemaah haji baru tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu calon jemaah haji reguler dan calon jemaah haji khusus.

**Tabel 3.2. Penambahan Jumlah Calon Jemaah Haji Baru Periode Triwulan I Tahun 2019**  
(ribu orang)

No	Jenis CalHaj	Target 2019	Triwulan I/2019		
			Target	Real	%
1	Reguler	650	170	148	89,59
2	Khusus	-	-	3,9	-

Jumlah penambahan dana kelolaan dari setoran awal calon jemaah haji baru tersebut di atas, baik jemaah haji reguler maupun khusus, secara akumulatif pada bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp3,76 triliun dengan pencapaian proporsional sebesar 23,14% dari target pertambahan dana kelolaan dari setoran awal total tahun 2019 sebesar Rp16,25 triliun (Tabel 3.3).

**Tabel 3.3. Penambahan Dana Kelolaan Baru BPKH Periode Triwulan I Tahun 2019**

No	Jenis CalHaj	Target 2019	Triwulan I/2019		
			Target	Real	%
1	Reguler (Rp triliun)	16,25	4,06	3,76	92,61
2	Khusus (Rp miliar)	-	-	55,29	-

Merujuk pada target pencapaian pendapatan BPKH tahun 2019, target total pendapatan dari nilai manfaat adalah sebesar Rp7,22 triliun. Jumlah tersebut berasal dari target nilai manfaat hasil investasi pada surat-surat berharga, emas, dan investasi lainnya dengan jumlah sebesar Rp4,26 triliun serta dari target hasil penempatan pada giro, tabungan, dan deposito di BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp2,96 triliun. Total target pendapatan dimaksud sudah termasuk target pendapatan nilai manfaat yang diperoleh dari DAU (Dana Abadi Umat), baik dari pendapatan penempatan dana di BPS-BPIH (Rp88,66 miliar) maupun dari pendapatan investasi (Rp111,66 miliar).

Total realisasi pendapatan nilai manfaat yang diperoleh BPKH berasal dari penempatan dana dan investasi periode Januari s.d. Maret 2019 adalah sebesar Rp1,59 triliun, dengan persentase pencapaian nilai manfaat BPKH *wide* sebesar 22,15% (dari total target nilai manfaat Rp7,22 triliun selama tahun 2019). Realisasi nilai manfaat untuk penempatan pada giro dan deposito (termasuk DAU) di BPS-BPIH adalah sebesar Rp807,51 miliar atau 27,28% dari target Rp2,96 triliun, sedangkan realisasi nilai manfaat untuk investasi adalah sebesar Rp791,59 miliar (termasuk DAU) atau 18,58% dari target Rp4,26 triliun.

Rincian target dan realisasi nilai manfaat BPKH periode Januari s.d. Maret 2019 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah.

**Tabel 3.4. Pendapatan BPKH dari Nilai Manfaat Periode Triwulan I Tahun 2019**

(Rp miliar)

No	Penempatan/ Investasi	Target 2019	Triwulan I/2019		
			Target	Real	%
1	Giro & Tabungan	2,96 triliun	3,57	7,21	201,96
2	Deposito		715	784,82	109,76
3	Deposito DAU		22,16	15,48	69,85
Total per Triwulan			740,73	807,51	109,01
4	Surat Berharga	4,26 triliun	920	759,40	82,54
5	Investasi Langsung		23,22	-	-
6	Emas		-	-	-
7	Investasi Lainnya		-	-	-
8	SBSN DAU		27,91	32,19	115,33
Total per Triwulan			971,13	791,59	81,51
Total		7,22 triliun	1.80 triliun	1,59	88,33

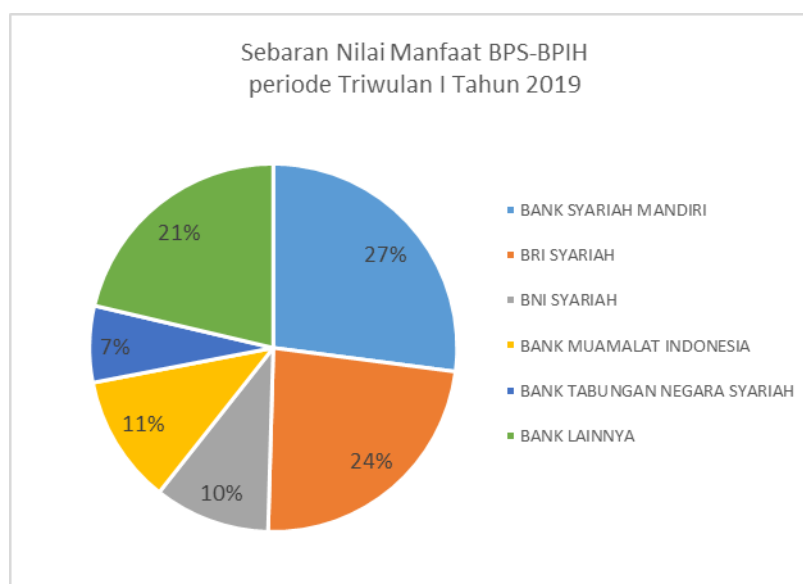
Realisasi portfolio investasi masih berada di bawah target bulan Maret 2019, yang disebabkan oleh:

- Sisa plafon persetujuan pembelian SBSN sebesar Rp705 miliar yang belum dapat dieksekusi karena *yield* obligasi yang menurun.

- Portfolio PYD yang belum dapat direalisasikan karena ada beberapa persyaratan dari Dewan Pengawas yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Mitra Investasi. Sudah dilakukan banding (*appeal*) kepada Dewan Pengawas untuk relaksasi beberapa klausul pada akhir Maret 2019. Atas hal tersebut diperlukan beberapa tambahan informasi dari Bank dan alternatif penjaminan dari Bank atas persyaratan Dewan Pengawas.
- Rencana penempatan di reksadana pasar uang syariah (RDPUS) belum dapat terealisasi. Persetujuan untuk penempatan RDPUS baru diperoleh dari Dewan Pengawas pada tanggal 4 April 2019 senilai total Rp1.2 triliun untuk 4 manajer investasi.

Untuk mencapai target minimum investasi dari total dana kelolaan haji sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2018, setidaknya dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp25 triliun di tahun 2019. Sebagai bahan pertimbangan dan analisis kegiatan investasi, bidang Investasi telah melaksanakan beberapa kajian (*non-budget activities*) berupa Kajian Industri Transportasi, Kajian Industri Listrik, Kajian Industri Emas, Kajian Industri Perkebunan, Kajian Industri Farmasi (Kimia Farma), Kajian Housing Market, dan Tinjauan Makro Ekonomi Indonesia.

Data sebaran perolehan nilai manfaat dari BPS-BPIH terbagi kepada 32 Bank, dimana lima bank tertinggi secara akumulatif Triwulan I 2019 berturut-turut adalah seperti pada gambar 1, dengan rincian per bulannya pada tabel 3.8. Sedangkan data lengkap sebaran nilai manfaat pada BPS-BPIH dapat dilihat pada Lampiran 1.



**Gambar 1. Sebaran Nilai Manfaat BPS-BPIH periode Triwulan I Tahun 2019**

**Tabel 3.5. Sebaran Nilai Manfaat pada BPS-BPIH Triwulan I Tahun 2019**  
(Rp miliar)

No	Bank	Januari	Februari	Maret	Total
1	Bank Syariah Mandiri	78,84	69,30	70,42	218,56
2	BRI Syariah	68,45	63,01	57,38	188,84
3	BNI Syariah	25,67	27,75	28,98	82,40
4	Bank Muamalat Indonesia	31,34	31,58	28,41	91,33
5	Bank Tabungan Negara Syariah	21,80	16,33	16,13	54,27
6	Bank Lainnya	69,36	55,65	47,10	172,11
	<b>Total</b>				<b>807,51</b>

Selain menempatkan dananya pada Investasi, BPKH menempatkan dananya pada produk Bank berupa Giro, Tabungan, dan Deposito. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017, bahwa penempatan dana setidaknya 50% dari jumlah total dana kelolaan. Jumlah tersebut masih belum dapat terlaksana, karena jumlah dana penempatan memiliki porsi sebesar 57,1%.

Pada tabel 3.6 s.d. tabel 3.8 di bawah, disampaikan secara rinci jumlah portfolio penempatan dana per bulan Maret 2019.

**Tabel 3.6 Tabel Portfolio Penempatan Dana Kelolaan Haji Reguler**

**Triwulan I Tahun 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO
<b>Dana Setoran Awal BPIH Reguler</b>	
Giro Kas Haji Umum Setoran Awal	99.396.870.889,46
Giro Kas Haji Umum Rekening Likuiditas (Mata Uang SAR)	1.851.607.407.684,78
Giro Kas Haji Umum Rekening Mitra Investasi	
Tabungan Dana Setoran Awal	260.000.000.000,00
Deposito Dana Setoran Awal	50.199.077.293.924,00
Deposito Dana Setoran Awal (Mata Uang USD)	3.875.792.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.285.873.972.498,20</b>
<b>Dana Setoran Lunas BPIH Reguler</b>	
Giro Kas Haji Umum Setoran Lunas	1.865.938.556,66
Deposito Dana Setoran Lunas	1.482.729.953.189,65
<b>Jumlah</b>	<b>1.484.595.891.746,31</b>
<b>Dana Nilai Manfaat BPIH Reguler</b>	
Giro Kas BPKH - Rekening Penempatan	11.487.187.652,01
Giro Kas BPKH - Rekening Penempatan (Mata Uang USD)	-
Giro Kas BPKH - Rekening Penempatan (Mata Uang SAR)	213.478.971,34
Giro Kas Haji Rekening Nilai Manfaat	180.585.340,79
	183.210.176.588,00
Deposito Dana Nilai Manfaat	2.642.093.827.057,88
Deposito Dana Nilai Manfaat - Lelang	2.155.612.971.668,00
Deposito Dana Nilai Manfaat (Mata Uang USD)	242.942.174.789,76
Deposito Dana Nilai Manfaat (Mata Uang SAR)	20.095.892.397,58
<b>Jumlah</b>	<b>5.255.836.294.465,35</b>
	<b>63.026.306.158.709,90</b>

**Tabel 3.7 Tabel Portfolio Penempatan Dana Kelolaan Haji Khusus**

**Triwulan I Tahun 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO
<b>Dana Setoran Awal BPIH Khusus</b>	
Giro Kas Haji Umum Setoran Awal (Mata Uang USD)	52.630.786.609,20
Deposito Dana Setoran Awal (Mata Uang USD)	2.093.115.084.095,76
<b>Jumlah</b>	<b>2.145.745.870.704,96</b>
<b>Dana Setoran Lunas BPIH Khusus</b>	
Giro Kas Haji Umum Setoran Lunas (Mata Uang USD)	801.462.061.610,04
Deposito Dana Setoran Lunas (Mata Uang USD)	664.767.088.290,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.466.229.149.900,04</b>
<b>Dana Nilai Manfaat BPIH Khusus</b>	
Giro Kas BPKH - Rekening Penempatan (Mata Uang USD)	8.521.194.244,92
Deposito Dana Nilai Manfaat (Mata Uang USD)	120.975.576.666,36
<b>Jumlah</b>	<b>129.496.770.911,28</b>
<b>TOTAL DANA HAJI KHUSUS</b>	<b>3.741.471.791.516,28</b>



**Tabel 3.8 Tabel Portfolio Penempatan Dana Abadi Umat**  
**Triwulan I Tahun 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO
Giro Dana Abadi Umat	4.886.821.325,00
Giro Dana Abadi Umat (Mata Uang USD)	
Deposito Dana Abadi Umat	843.595.198.595,00
Deposito Dana Abadi Umat (Mata Uang USD)	40.692.159.919,32
<b>TOTAL DANA ABADI UMAT</b>	<b>889.174.179.839,32</b>

**Tabel 3.9. Distribusi Nilai Manfaat DAU untuk Program Kemaslahatan**  
**Periode Triwulan I Tahun 2019**

No	Kelompok <i>Asnaf</i>	Target 2019	Triwulan I/2019		
			Target	Real	%
1	Pendidikan & Dakwah	2,55	0,64	2,06	322,53
2	Pelayanan Haji	119,58	29,90	0,49	1,65
3	Sarana/Prasarana Ibadah	14,25	3,56	0,60	16,92
4	Kesehatan	9,45	2,36	0,11	2,36
5	Pemberdayaan Ekonomi	-	-	-	-
6	Sosial Keagamaan	7,40	1,85	0,58	31,23
7	Rehab Palu & Donggala	21,25	5,31	-	0,00
8	Bantuan Bencana	2,66	0,67	-	0,00
	<b>Total</b>	<b>177,13</b>	<b>44,29</b>	<b>3,84</b>	<b>8,68</b>

Distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) mengalami perubahan target kelompok sasaran, dari sebelumnya 8 (delapan) kelompok atau *asnaf* pada awal terbentuknya BPKH, menjadi 6 (enam) kelompok pada saat direalisasikan tahun 2018 dan Triwulan I tahun 2019. Enam *asnaf* yang menjadi sasaran dalam program penyaluran nilai manfaat dari DAU adalah: Pendidikan, Dakwah, dan Pelayanan Haji; Sarana/Prasarana Ibadah; Kesehatan; Sosial Keagamaan; Rehab Palu dan Donggala; serta Bantuan Bencana. Pada Triwulan I tahun 2019, beberapa *asnaf* yang sudah menerima distribusi nilai manfaat DAU adalah: Pendidikan, Dakwah dan Pelayanan Haji; Sarana/Prasarana Ibadah; Kesehatan; dan Sosial Keagamaan.

**Tabel 3.10. Distribusi Nilai Manfaat (NM) melalui *Virtual Account* (VA)**  
**Periode Triwulan I Tahun 2019**

No	Deskripsi	Target 2018	Realisasi 2018	Triwulan I/2019		
				Target	Real	%
1	Total NM	Rp6,07 triliun	Rp5,73 triliun	Rp1,80 triliun	Rp1,59 triliun	88,33
2	NM yg distribusikan	20% dari NM 2018	Rp777,39 miliar	-	Rp499,95 miliar	-
3	Total VA	-	-	-	<b>4.132.786 Rekening</b>	-
	a. Reguler	-	-	-	<b>4.041.702 Rekening</b>	-
	Set. Awal Rp20 juta	-	-	-	19.006 Rekening	-
	Set. Awal Rp25 juta	-	-	-	4.022.696 Rekening	-
	b. Khusus	-	-	-	<b>91.084 Rekening</b>	-
	Set. Awal \$3000	-	-	-	146 Rekening	-
	Set. Awal \$4000	-	-	-	90.938 Rekening	-

No	Deskripsi	Target 2018	Realisasi 2018	Triwulan I/2019		
				Target	Real	%
4	NM per VA	-	-	-	<b>Rp674.224,-</b>	-
	a.Regular	-	-	-	<b>Rp212.148,-</b>	-
	Set. Awal Rp20 juta	-	-	-	Rp94.288,-	-
	Set. Awal Rp25 juta	-	-	-	Rp117.860,-	-
	b. Khusus	-	-	-	<b>Rp462.076,-</b>	-
	Set. Awal \$3000	-	-	-	Rp198.033,-	-
	Set. Awal \$4000	-	-	-	Rp264.043,-	-

Nilai manfaat tahun 2018 yang didistribusikan kepada jemaah tunggu melalui rekening virtual total adalah sebesar Rp777,39 miliar, dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp499,95 miliar, didistribusikan pada tanggal 7 Februari 2019 kepada 4.041.702 rekening virtual milik calon haji jemaah tunggu reguler dan 91.084 rekening virtual milik calon haji jemaah tunggu khusus. Pada masing-masing rekening virtual calon haji jemaah tunggu reguler mendapatkan distribusi nilai manfaat Rp94.288,- (untuk setoran awal Rp20 juta) dan Rp117.860,- (untuk setoran awal Rp25 juta); sedangkan pada masing-masing rekening virtual calon haji jemaah tunggu khusus mendapatkan distribusi nilai manfaat Rp198.033,- (untuk setoran awal \$3000) dan Rp264.043,- (untuk setoran awal \$4000). Tahap kedua sisanya Rp277,44 miliar akan didistribusikan kepada VA milik calon haji jemaah tunggu setelah pelaksanaan audit BPK untuk kinerja BPKH tahun 2018 selesai. Sedangkan distribusi nilai manfaat tahun 2019 ke rekening virtual calon haji jemaah tunggu akan dilakukan pada awal tahun 2020 setelah besaran nilai manfaat tahun 2019 diperoleh dan dicatat pada neraca BPKH.

#### IV. Kinerja Bidang Secara Umum

Kinerja masing-masing bidang diukur melalui dua aspek, yaitu: persentase pencapaian terhadap rencana output dan persentase penyerapan atas rencana anggaran. Kombinasi antara pencapaian output yang optimal dengan penyerapan anggaran yang optimal juga, diharapkan mampu mendorong pencapaian target kinerja organisasi BPKH *wide*.

Berdasarkan hasil *self assessment* kinerja yang dilakukan oleh masing-masing bidang, selama periode Triwulan 1 tahun 2019 terdapat beberapa bidang yang mencapai output 100% antara lain Sekban dan Investasi. Sedangkan pencapaian kinerja dari bidang-bidang lainnya bervariasi antara 10% hingga 78%. Untuk penyerapan anggaran selama periode yang sama, penggunaan anggarannya pun bervariasi antara 1% hingga mendekati 60% dari anggaran kegiatan-kegiatan yang proporsional diimplementasikan pada periode tersebut. Bidang yang telah menyerap anggaran hingga mendekati 60% antara lain adalah bidang Investasi dan Audit Internal.

Pada skala BPKH *wide*, pencapaian output periode Triwulan I 2019 adalah sebesar 55,26%, sedangkan tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 16,89%. Rekap kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.4, sedangkan rincian kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada Lampiran 2.

**Tabel 4.1. Pencapaian Output per Bidang Periode Triwulan I Tahun 2019**

No	Anggota	Target 2019	Real	%
1	A1	6	1	17
2	A2	38	10,57	27,82
3	A3	11	2	18,18
4	A4	46	38	82,60
5	A5	26	11	42,31
6	A6	57	9	16
7	A7	11	2,5	23
8	Audit Intern	9	0	0
9	Sekban*	35	35	100
10	Sekdewas*	76	65	85,53
	<b>Total</b>	<b>315</b>	<b>174,07</b>	<b>55,26</b>

Berdasarkan tabel di atas, secara umum kegiatan yang terdapat pada Sekretariat Badan dan Sekretariat Dewan Pengawas bersifat insidental (tidak terencana) seperti kegiatan rapat, pengadaan ATK, pengadaan souvenir, kalender, dan media publikasi. Sehingga realisasi pencapaian output dalam laporan adalah pemenuhan atas target pada bulan berjalan. Oleh karena itu, pencapaian target output mendekati 100%.

**Tabel 4.2. Penyerapan Anggaran per Bidang Periode Triwulan I Tahun 2019**

(Rp juta)

No	Anggota	Triwulan I/2019		
		Target 2019	Real	%
1	A1	1.017	346	33,98
2	A2	4.285	437	10,20
3	A3	683	32	4,69
4	A4	1.577	913	57,86
5	A5	182.769	33.472	18,31
6	A6	20.797	213	1,02
7	A7	845	14	1,71
8	Audit Internal	1.577	913	57,86
9	Sekban	2.173	769	35,40
10	Sekdewas	11.766	1.306	11,10
	<b>Total</b>	<b>227.489</b>	<b>38.414</b>	<b>16,89</b>

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam RKAT 2019, setiap bidang mempunyai *non budgetary activities*. Pada periode Januari s.d. Maret 2019, jumlah total *non budgetary activities* BPKH adalah sebanyak 40 kegiatan dan yang telah diselesaikan sebanyak 37 kegiatan atau 97% dari tugas yang diberikan. Rincian aktivitas yang tidak mempunyai anggaran dan telah diselesaikan pada Triwulan I 2019 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKH pada Bulan April 2019 adalah total sebanyak 52 kegiatan dengan dukungan anggaran total sebesar Rp28,85 miliar. Rincian rencana kegiatan dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

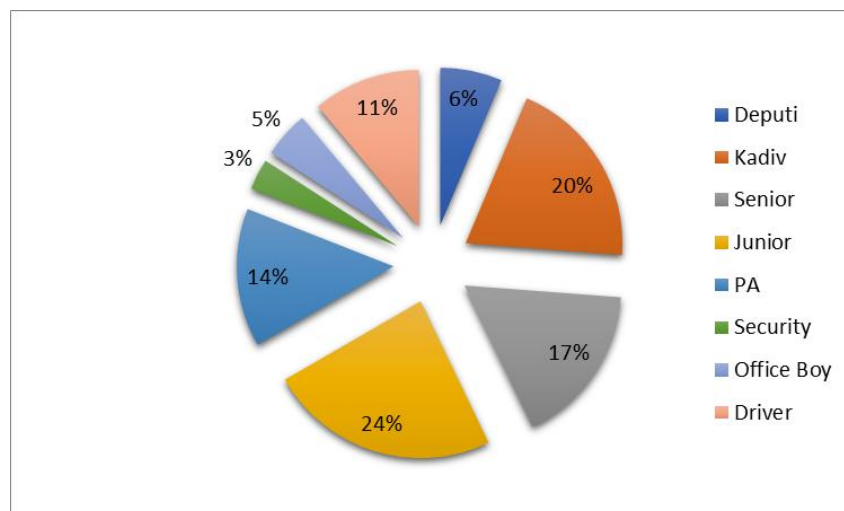
## V. Kegiatan *Expose Media* dan Rapat dengan *Stakeholder*

Beberapa kegiatan *expose media* dan rapat dengan para *stakeholder* rutin dilakukan sebagai cara meningkatkan *Corporate Branding* dan menjaga hubungan baik. Kegiatan-kegiatan terkait media dan interaksi dengan *stakeholder* sampai dengan bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut:

- Media *Briefing* dilaksanakan 1 kali
- Rapat dengan DPR dilaksanakan 4 kali
- Rapat dengan Kementerian Agama dilaksanakan 1 kali
- Media massa (CNBC, TV One, iNews, Kompas, Republika, Portal Online, Detik) dilaksanakan 6 kali.

## VI. SDM BPKH *Wide*

Pada Triwulan I tahun 2019, jumlah pegawai BPKH saat ini adalah 126 orang. Jumlah tersebut tersebar ke dalam berbagai posisi antara lain Deputi, Kepala Divisi, Staf Pelaksana (Senior dan Junior), *Personal Assistant*, *Security*, *Office Boy*, dan *Driver*. Sebaran data pegawai BPKH dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 6.1 Sebaran Data Pegawai BPKH

Berdasarkan diagram di atas, sebaran data pegawai terlihat merata pada masing-masing jabatan. Namun, komposisi terbesar dari jumlah pegawai BPKH adalah staf Junior.

Proses rekrutmen masih tetap dilakukan dalam rangka memenuhi jabatan yang masih belum terisi. Jabatan yang masih belum terisi tersebut adalah jabatan Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan, Kepala Divisi Hukum, dan Kepala Divisi Pengadaan. Proses rekrutmen pegawai dilakukan melalui seleksi terbuka di *website* resmi BPKH yang sampai dengan saat ini sudah memasuki tahapan proses asesmen.

*Turnover* pegawai BPKH adalah sebesar 1,83% sampai dengan bulan Maret 2019 atau sebanyak 7 orang dari total 126 pegawai BPKH.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai penghargaan bagi para pegawai BPKH, bidang SDM telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang telah terlaksana pada triwulan I 2019 adalah pelatihan Induksi Pegawai yang diikuti seluruh pegawai BPKH dan

pelatihan Media Sosial yang diikuti para staf Junior. Kegiatan pelatihan akan terus dilakukan bidang SDM demi terciptanya pegawai yang memiliki kompetensi yang mumpuni.

## VII. Manajemen Risiko BPKH *Wide*

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPKH dapat terekspos pada beberapa risiko. Beberapa risiko utama yang wajib dikelola antara lain:

- Risiko kredit dari aktivitas penempatan dan investasi. Total Dana Kelolaan terkonsentrasi pada penempatan sebesar Rp67,53 triliun atau setara 57,65% dari total dana kelolaan dan Investasi Rp49,61 triliun atau setara 42,35% dari total dana kelolaan. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Februari 2019), komposisi portofolio mengalami perubahan, dimana konsentrasi pada investasi turun dari 45,20% menjadi 42,35%. Penurunan komposisi investasi disebabkan adanya surat berharga yang jatuh tempo sebesar Rp3 triliun.
- Risiko pasar BPKH muncul dari aktivitas penerimaan calon jemaah haji khusus, pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan reksadana. Di Triwulan I tahun 2019, posisi devisa *netto* BPKH adalah *Long*. Dengan menggunakan Posisi Devisa Neto tersebut, maka terdapat potensi keuntungan/kerugian yang akan terjadi adalah - Rp51,34 miliar s.d. Rp51,34 miliar. Posisi NAB dari reksadana yang dimiliki BPKH pada tanggal 21 Maret 2019 tercatat sebesar Rp1.016,36 atau tumbuh 0,50% dalam 1 bulan (22 Mar-21 Apr). *Yield* yang didapatkan dari Reksadana arafah sebesar 6,60% (*nett*). Kondisi *yield* ini turun apabila dibandingkan dengan *yield* bulan Februari 2019 yang mencapai 6,78%. Penurunan *yield* disebabkan karena adanya penurunan imbal hasil dari *underlying* reksadana arafah, yaitu deposito.
- Risiko likuiditas BPKH termitigasi dengan baik, dimana BPKH mampu memenuhi kewajiban untuk menyediakan 2 kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan mampu menyediakan kebutuhan USD untuk kebutuhan BPIH tahun ini. Upaya pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing telah dilakukan oleh BPKH melalui lelang pengadaan valuta asing USD sesuai kebutuhan.
- Risiko kepatuhan muncul akibat masih belum terpenuhinya komposisi antara investasi dan penempatan. Pada PP No.5 tahun 2018, komposisi yang wajib dipenuhi adalah 50% untuk penempatan dan 50% untuk investasi. Namun sampai dengan akhir Maret 2019, realisasi komposisi investasi dan penempatan adalah sebesar 42,35% dan 57,65%.
- Risiko stratejik BPKH muncul karena adanya deviasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi pada bulan Maret 2019. Pencapaian dana kelolaan melebihi target (101,99%), namun pencapaian tersebut tidak diiringi dengan pencapaian total Jemaah yang hanya 89,59% dari target proporsional bulan Maret 2019. Begitupun dengan pencapaian nilai manfaat yang hanya sebesar 91,11% dari target proporsional bulan Maret 2019.

Laporan Manajemen Risiko BPKH pada triwulan pertama tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5.

### VIII. Laporan Hukum dan Kepatuhan

Sampai dengan bulan Maret 2019, bidang Hukum dan Kepatuhan telah menyampaikan progres mengenai rencana penyusunan PBPKH sebagai berikut:

No	Nama Peraturan	Pemrakarsa	Progres Saat ini
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	A5	a. Tahap Penyusunan b. Posisi di Pemrakarsa
2.	Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	A6	a. Draft peraturan telah melalui proses harmonisasi dengan catatan akan diadakan revisi teknis terkait basis maksimal besaran di BPS BPIH b. Posisi di Premakarsa
3.	Perencanaan, Penyusunan Revisi, Pelaksanaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Anggaran BPKH	A2 dan A3	a. Perlu dilakukan <i>review</i> dan amandemen PBKH No. 6/2018 b. Perlu ada inisiasi proses dari Pemrakarsa
4.	Pengelolaan Kekayaan berupa Barang yang Dapat dinilai dengan Uang	A3	a. Draft Peraturan telah melalui proses harmonisasi dengan catatan akan diadakan revisi teknis dan perbaikan. b. Posisi di Pemrakarsa
5.	Pedoman Pengedalian Keuangan dan Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pengelolaan Likuiditas	A3	a. Draft Peraturan telah melalui proses harmonisasi dengan catatan akan diadakan revisi teknis dan perbaikan. b. Posisi di Pemrakarsa
6.	Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji	A3	Perlu ada inisiasi proses dari Pemrakarsa
7.	Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban BPKH	Kepala dan A3	Perlu ada inisiasi proses dari Pemrakarsa
8.	Pedoman Pengawasan dan Pemantauan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji	Dewan Pengawas	Perlu ada inisiasi proses dari Pemrakarsa
9.	Tata Cara Pemberian Persetujuan atas Renstra dan RKAT Pengelolaan Keuangan Haji serta Penempatan dan/atau Investasi Haji	Dewan Pengawas	Perlu ada inisiasi proses dari Pemrakarsa

Laporan kinerja bidang Hukum dan Kepatuhan secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 (enam).

### IX. Laporan Hasil Audit Internal BPKH

Pada Triwulan I Tahun 2019, Bidang Audit Internal telah melaksanakan kegiatan audit umum dengan tema Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Program Kemaslahatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Pelaksanaan audit tersebut berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pelaksana Nomor: B.317/BPKH/02/2019 tanggal 18 Februari 2019. Audit tersebut dilaksanakan selama 15 hari kerja (dalam kantor) sejak tanggal 18 Februari 2019 s.d. 11 Maret 2019, ditambah dengan *kunjungan on site* program kemaslahatan ke Bandung dan Palu sejak tanggal 25 Maret s.d. 29

Maret 2019 dan kunjungan *on site* ke Sumedang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Padang Lawas Utara pada tanggal 7 April s.d. 9 April 2019.

Tujuan audit adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal pengelolaan program kemaslahatan dalam mendukung tercapainya sasaran dan akuntabilitas program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit diarahkan pada pengujian efektivitas sistem pengendalian internal program kemaslahatan pada tahap:

- a. Perencanaan program, yaitu tahap penganggaran dan penetapan prioritas program.
- b. Pelaksanaan program, meliputi tahap:
  1. Pengajuan proposal.
  2. Verifikasi dan penilaian kelayakan proposal.
  3. Persetujuan proposal.
  4. Pencairan dana.
  5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program.
- c. Monitoring dan evaluasi program.

Hasil audit menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan program kemaslahatan, diantaranya: (1) kebijakan yang belum lengkap dan jelas mengatur detail pengelolaan program kemaslahatan dan (2) kelemahan pengendalian internal terutama dalam tahap verifikasi dan penilaian kelayakan proposal, pelaporan dan pertanggungjawaban program, serta monitoring program.

Laporan Hasil Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Program Kemaslahatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 telah diterbitkan dengan Nomor: 01/LHA/AI/04/2019 tanggal 29 April 2019. Laporan Hasil Audit tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pengawas melalui Komite Audit melalui Memo Internal Deputi Audit Internal Nomor B.53/BPKH/BP/A1-IA/04/2019 tanggal 29 April 2019.

#### **X. Laporan Keuangan BPKH**

Kondisi kinerja keuangan BPKH pada Triwulan I 2019 menunjukan pergerakan positif, dimana terjadi peningkatan total aset sebesar 3,6%. Kenaikan tersebut tercermin dari nilai aset BPKH yang semula sebesar Rp112,93 triliun menjadi Rp116,99 triliun. Kenaikan total aset tersebut, didominasi oleh penambahan instrumen investasi jangka panjang yang mengalami kenaikan sebesar 17,90% apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2018. Penambahan instrumen investasi jangka panjang tersebut berasal dari bertambahnya dana titipan calon Jemaah haji (setoran awal) dan beberapa instrumen investasi jangka pendek yang sudah *mature*.

Pada periode Triwulan I tahun 2019, Bidang keuangan melakukan lelang valuta asing (valas) USD/SAR dalam rangka proses pembayaran BPIH ke Kementerian Agama, hal tersebut bertujuan sebagai mitigasi risiko nilai tukar mata uang asing. Salah satu cara untuk menjaga nilai tukar mata uang asing tersebut adalah dengan penetapan HPS terhadap pembelian valas. Efisiensi yang diperoleh dari kegiatan lelang valas dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

**Tabel 10 Penghematan Aset BPKH Akibat Keberhasilan Mitigasi Risiko  
(Efisiensi Pembelian USD dan SAR)**

<b>No</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Efisiensi terhadap Nilai HPS</b>	<b>Efisiensi terhadap HPS kepada Kemenag</b>
1	USD	Rp20.545.800.000	Rp63.529.300.000
2	SAR	Rp91.511.192	Rp95.135.035

Laporan Keuangan BPKH pada triwulan pertama tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7.

#### **XI. Penutup**

Laporan kinerja dan laporan keuangan Triwulan I ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BPKH dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Seluruh kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, baik yang didukung dengan anggaran maupun tidak, bertujuan untuk mendorong pencapaian target BPKH tahun 2019.

Oleh karena itu, Badan Pelaksana akan memastikan bahwa seluruh proses kegiatan baik yang memiliki anggaran (RKAT) maupun yang tidak memiliki anggaran dilaksanakan sesuai dengan input dan output yang telah direncanakan, serta anggaran digunakan berdasar pada prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.